

# INDEKS PENGELOLAAN MASJID DAN PEMBERDAYAAN UMAT DI KABUPATEN PONOROGO DAN BOJONEGORO JAWA TIMUR

## The Index Of Mosque Management And Community Empowerment In District Of Ponorogo And Bojonegoro East Java

Moch. Lukluil Maknun

Balai Litbang Agama Semarang  
Jl. Untung Suropati Kav 70  
Bambankerep, Ngaliyan, Semarang  
email : lukluilmaknun84@gmail.com

Artikel diterima: 31 Januari 2018  
Artikel direvisi: 21 Maret - 2 April 2018  
Artikel disetujui: 24 Juni 2018

### ABSTRACT

*The government, in 2014, has set the minimum requirements of mosque management according to its typology from the central to the village level. Besides as a place of ritual worship, another function of the mosque as recommended by the government, is as a means of social worship in the field of economic, education, and socio-culture. This study uses quantitative approach to disclose people's perception towards X variable (mosque management at village) and Y variable (community empowerment) and to measure the magnitude of influence in Ponorogo and Bojonegoro. People's perception on the mosque management and community empowerment in two districts is generally good. The data show that the people's perception of two variables in Ponorogo (2 %) is better than Bojonegoro (10 %). The result of influence measurement (regression) of mosque management on the community empowerment in both districts indicated that the correlation between the two variables is quite strong. The influence magnitude of mosque management on the community empowerment is for Ponorogo (53%) and Bojonegoro (54%). Based on data, there is weakness on the aspects of organizing and implementation in the mosque management variable and administering local people on community empowerment. In general, the mosque is still considered to have paid less attention to the community economic empowerment and adolescent enhancement through instruction.*

**Keyword:** mosque management; community empowerment; influence index; perception

### ABSTRAK

*Pemerintah pada tahun 2014 telah menetapkan syarat-syarat minimal pengelolaan masjid sesuai tipologinya yaitu dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Di antara fungsi masjid yang disarankan pemerintah selain menjalankan kepentingan ibadah ritual adalah menjadi sarana ibadah sosial di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif mengungkap persepsi masyarakat terhadap variabel X (pengelolaan masjid di tingkat desa/kelurahan) dan variabel Y (pemberdayaannya umat) serta mengukur besaran pengaruhnya di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat di kedua Kabupaten secara umum baik. Hasil data memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dua variabel di Ponorogo lebih baik dari Bojonegoro meskipun hanya berselisih 2% dan 10%. Hasil pengukuran pengaruh (regresi) pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat di kedua Kabupaten menyatakan bahwa korelasi kedua variabel cukup kuat. Besaran pengaruh pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat sebesar 53% untuk Ponorogo dan 54% untuk Bojonegoro. Dari data yang diperoleh, ditemukan adanya kelemahan pada aspek pengorganisasian dan pelaksanaan dalam variabel pengelolaan masjid, serta aspek pengorganisasian lokal masyarakat pada pemberdayaan umat. Secara umum, masjid dinilai masih kurang dalam memperhatikan pemberdayaan ekonomi jamaah serta penyelenggaraan kajian untuk remaja.*

**Kata Kunci:** pengelolaan masjid, pemberdayaan umat, indeks pengaruh, persepsi

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan masjid di Indonesia terus mengalami kenaikan. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa pertumbuhan masjid dalam kurun waktu 10 tahun berkisar pada 65-70 persen. Sedangkan menurut Ditjen Bimas Islam, pertumbuhan masjid bertambah hingga 20% pertahun. Ribuan proposal pembangunan atau perbaikan masjid juga diajukan kepada Kementerian Agama setiap tahun. Data tahun 2013, jumlah masjid dan musala di Jawa Timur mencapai 127.439 (Ichsan, 2014: 1).

Semangat umat Islam untuk memanfaatkan masjid sebagai sarana ibadah dan interaksi sosial sangat besar, seperti terlihat dalam pengelolaan zakat dan daging kurban yang sangat tergantung pada masjid (Ichsan, 2014: 1). Masjid di kota-kota besar, bahkan sudah banyak yang memenuhi fungsi lebih luas, yang tidak hanya berkisar pada urusan ibadah ritual. Penelitian Kurniawati (2010) mendeskripsikan peran masjid Nurus Sa'adah (masjid jami kelurahan) Salatiga yang juga memberikan bantuan sosial kemasyarakatan berupa beasiswa, pengobatan gratis, dan perpustakaan umum. Suryani (2015) menggambarkan bahwa masjid Al-Akbar Surabaya juga memberikan peran penggerak perekonomian terutama dengan adanya pasar PKL (pedagang kaki lima).

Selain perkembangan fungsi masjid dalam arti positif, ada pula masjid yang diselewengkan fungsinya sebagai media (lokasi) penanaman dan penyebaran paham intoleran. Penguasaan masjid dan pengkaderan jamaah dengan basis masjid menjadi salah satu ciri paham intoleran Islam (Rapik, 2014: 111). Oleh karenanya, pemerintah terus mengupayakan pengawasan terhadap masjid yang ada di lingkungan masyarakat dengan kerjasama antara pihak pemerintah (Kementerian Agama) dengan masyarakat.

Diskusi dan sumbangan pemikiran tentang pentingnya peran masjid dan pengembalian masjid dalam fungsi fitrahnya (masjid pada masa Nabi) banyak dilakukan oleh para penulis dalam artikel mereka. Di antara yang mendeskripsikan

hal ini adalah Ruslan (2012) yang melakukan pengamatan terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Pontianak. Astari (2014) menuangkan ide pengembalian fungsi masjid sebagai pusat peradaban masyarakat. Dalmeri (2014) menuliskan pemikiran yang hampir sama yang menekankan masjid tidak sebatas tempat ibadah melainkan pusat dakwah, aktivitas sosial, dan ekonomi umat Islam. Kemudian Kurniawan (2014) yang melakukan kajian kepustakaan seakan memberi kesimpulan dari beberapa contoh kajian sebelumnya bahwa secara umum fungsi masjid di Indonesia saat ini mengalami penyempitan fungsi, yaitu hanya sebagai tempat ibadah saja.

Salah satu langkah pemerintah dalam pengawasan masjid melalui Dirjen Bimas Islam yaitu menetapkan standar pembinaan manajemen masjid dalam surat keputusannya pada tahun 2014. Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat berkualitas, modern, dan toleran. Masjid seyogyanya tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual (*mahdlah*) tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*ghair mahdlah*) di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya (Dirjen Bimas Islam, 2014: 1).

Dirjen Bimas juga telah membuat tipologi masjid berikut syarat-syarat kelengkapan dan panduan pengelolaannya dari masjid lingkup negara hingga lingkup desa. Standar pengelolaan masjid meliputi aspek *idarrah* (administrasi/manajemen), *imarah* (memakmurkan), dan *riayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas). Di antara aspek standar *imarah* masjid jami (desa/kelurahan) adalah; Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (non formal) seperti madrasah diniyah, TPQ, majlis taklim, dan lain sebagainya; Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi seperti pengumpulan zakat, BMT, dan koperasi; Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan; dan Menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid (Dirjen Bimas Islam, 2014: 3).

Pertumbuhan masjid yang terus bertambah sehingga pemerintah membuat persyaratan terkait kelengkapan yang harus ada pada tiap masjid sesuai tipologinya. Belum banyak ditemukan hasil kajian masjid yang mengukur manajemen masjid dan pemberdayaan umat, selain yang bersifat kualitatif dan studi kasus. Oleh karena itu, dipandang perlu melihat kondisi pengelolaan dan pemberdayaan umat di lingkup masjid-masjid tingkat daerah, yang dalam artikel ini dibatasi pada dua kabupaten, Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro. Hal ini dilakukan sebagai langkah melihat kondisi masjid dari lingkup paling kecil (desa/kelurahan) yang dapat dijadikan ukuran untuk mewakili atau memperkirakan kondisi masjid di daerah secara umum. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana indeks pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat di kedua kabupaten ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka artikel ini bertujuan mendeskripsikan indeks pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro, dan pengaruh pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat di kedua kabupaten tersebut. Secara praktis penelitian ini bertujuan mengetahui besaran indeks persepsi masyarakat terhadap pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat dan mengetahui besaran pengaruh pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan keilmuan terkait pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan kepada Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam, Dewan Masjid Indonesia, pengelola masjid dan jamaah di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro, serta pihak-pihak terkait.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Pengelolaan masjid**

Kata masjid dalam arti mudah merupakan “tempat bersembahyang umat Islam” (Suharso,

2005: 312). Fungsi asal masjid memang sebagai tempat beribadah menyembah Allah. Namun, masjid juga memiliki fungsi sosial kemasyarakatan. Sejak masa Nabi, masjid juga difungsikan sebagai pusat budaya, ilmu pengetahuan, informasi, pengembangan ekonomi rakyat, dan pengaturan strategi perang (Bahri, 2011: 30; Kurniawan, 2014: 169).

Masjid di Indonesia berdasarkan tipologinya (struktur, sektoral, teritorial, dan sejarah) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam: masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, dan masjid di tempat publik (Dirjen Bimas Islam, 2014: 3). Objek penelitian yang dijadikan sampel di tiap kabupaten dalam penelitian ini dibatasi pada masjid yang berada di wilayah kelurahan atau pedesaan untuk mewakili wilayah terkecil dari tipologi masjid, dan jika tidak ditemukan adalah masjid besar (masjid kecamatan) yang berada dan mewakili desa/kelurahan di sampel penelitian.

Kata pengelolaan identik dengan kata manajemen yang merupakan serapan dari bahasa asing. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu/cara mengkoordinasikan dan mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia melalui beberapa langkah untuk mencapai tujuan (Adriansyah, 2017: 12). Oleh karenanya, penilaian pengelolaan masjid dapat dilakukan dengan menilai aspek-aspek yang ada dalam teori manajemen.

Ada banyak pakar manajemen dengan berbagai pendapatnya. Salah satu di antaranya yang sering diikuti dan relevan teorinya sebagai dasar penelitian adalah George R Terry. Ia menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4: *planing, organizing, actuating, dan controlling* (POAC) (Adriansyah, 2017: 13). Selanjutnya penelitian ini menggunakan istilah “perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan” untuk menggantikan istilah POAC sebagai sub variabel pengelolaan masjid.

Pengelolaan masjid dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai proses pengelolaan

yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian jamaah, pelaksanaan berbagai program, serta pengawasan terhadap kegiatan demi mencapai tujuan, salah satunya yaitu memberdayakan umat.

### **Pemberdayaan umat**

Kata umat sudah sangat akrab dalam bahasa Indonesia. Kamus dalam arti sempit/mudah mengartikannya sebagai “pengikut/pemeluk suatu agama” (Suharso dan Retnaningsih, 2005: 613). Umat dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai orang-orang yang sering melakukan ibadah di masjid yang dekat dengan lingkungannya sehingga disebut jamaah masjid tersebut.

Adapun kata pemberdayaan atau dalam istilah lain disebut *empowerment* dapat dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya. Tujuan pemberdayaan adalah membentuk masyarakat yang lebih mandiri (Maharani, 2012: 2). Penilaian pemberdayaan dapat dilihat dari nilai tiap-tiap unsurnya yaitu: 1) aksesibilitas informasi (kemampuan akses yang diterima masyarakat), 2) partisipasi/keterlibatan, 3) akuntabilitas (pertanggungjawaban publik atas kegiatan yang dilakukan atas nama masyarakat), dan 4) kapasitas organisasi lokal (kemampuan bekerjasama, mengorganisir, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah bersama) (Maharani, 2012: 3). Pemberdayaan umat dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha takmir masjid dalam memberdayakan jamaahnya dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki jamaah agar menjadi lebih mandiri yang didukung dengan berbagai fasilitas oleh pihak masjid.

### **Hipotesis Penelitian**

Terdapat hipotesis mayor dan hipotesis minor dari penelitian ini. Hipotesis mayor: terdapat pengaruh pengelolaan masjid terhadap

pemberdayaan umat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Hipotesis minor: terdapat hubungan positif antara pengelolaan masjid dengan pemberdayaan umat. Semakin baik pengelolaan masjid, semakin baik pula pemberdayaan terhadap umat. Demikian pula sebaliknya.

### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian tim Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan judul yang sama, yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penentuan lokasi dilakukan secara random sampling hingga ditemukan delapan kabupaten/kota di tiap provinsi. Adapun peneliti mendapatkan tugas penelitian di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survey. Lokasi penelitian dipilih menggunakan metode sampel acak yang menghasilkan 16 Kota/Kabupaten. Di antaranya yang terpilih adalah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Di tiap Kabupaten kemudian dilakukan acak untuk mengambil 5 kecamatan. Tiap kecamatan terpilih diambil 4 masjid dengan purposif sampling, yaitu masjid tingkat desa/kelurahan. Tiap masjid dipilih 5 orang responden yang terdiri dari pengurus takmir dan jamaah. Dengan demikian, tiap Kabupaten terkumpul 100 orang responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan media kuesioner kepada responden yang dipilih acak dengan mengambil perwakilan dari unsur jamaah dan pengurus di setiap masjid. Penyebaran kuesioner dibantu oleh surveyor di lokasi penelitian yang terdiri dari para penyuluh. Pengukuran pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Sugiyono (2010: 132) menyatakan bahwa skala likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Jawaban yang dikumpulkan dapat berasal dari pernyataan positif ataupun negatif. Pembobotan jawaban sebagai berikut.



**Tabel 1.** Skala likert jawaban

Nilai	+	-
Untuk jawaban Sangat Sesuai (SS)	4	1
Untuk Jawaban Sesuai (S)	3	2
Untuk Jawaban Tidak Sesua (TS)	2	3
Untuk Jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS)	1	4

Sumber: Diolah dari Sugiyono, 2010: 92-94

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen tim yang sudah melewati uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dimaksudkan sebagai ukuran kemampuan sebuah tes/kuesioner mengukur sesuatu, sedangkan uji reliabilitas mengukur keajegan hasil pengukuran untuk dapat digunakan oleh orang atau dalam waktu yang berlainan. Draft instrumen awal terdiri dari 40 butir pertanyaan “pengelolaan masjid” dan 35 butir pertanyaan “pemberdayaan umat”. Draft ini kemudian diujicobakan di Kabupaten Kendal dengan menyebarkan 50 eksemplar kuesioner. Hasil uji validitas item pada skala “pengelolaan masjid” tersisa 25 item *favorable* dan 1 item *unfavorable*, sehingga total item kuesioner pengelolaan masjid yang valid adalah 26. Adapun hasil validitas pada item skala “pemberdayaan umat” hanya tersisa 21 item *favorable*, tidak menyisakan item *unfavorable*. Demikian pula hasil reliabilitas, tersisa 26 item variabel “pengelolaan masjid” yang reliabel/mampu mengukur pemberdayaan umat, dan 21 butir pertanyaan “pemberdayaan umat” yang reliabel (Mawardi, dkk. 2017: 24-27).

Selain uji validitas dan reliabilitas, instrumen (kuesioner) juga melewati uji normalitas dan linieritas. Uji normalitas menggunakan uji nilai *Kolmogorov Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi data variabel dan kemungkinan dilakukan uji berikutnya yaitu uji regresi (pengaruh). Hasil uji normalitas variabel “pengelolaan masjid” adalah 0,250 yang berarti lebih besar dari syarat minimal normalitas data 0,05. Sedangkan uji normalitas variabel “pemberdayaan umat” adalah 0,163. Dengan demikian, kedua variabel (pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat) memenuhi syarat minimal untuk uji regresi. Adapun uji linieritas

untuk mencari persamaan garis regresi variabel x terhadap y digunakan uji Anova dengan hasil yang memperlihatkan signifikansi sebesar 0,389, yang lebih besar dari syarat minimal 0,05, sehingga memenuhi syarat uji regresi (Mawardi, dkk. 2017: 27-29).

Pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat merupakan dua variabel yang dapat memiliki hubungan fungsional, dalam hal ini adalah hubungan pengaruh. Fungsi penelitian ini di antaranya adalah memenuhi tuntutan keilmuan untuk meramalkan, menggambarkan, mengontrol, ataupun menerangkan pengaruh variabel pertama terhadap variabel kedua. Hubungan pengaruh ini dapat diukur menggunakan analisis regresi. Analisis regresi di sini berarti mengukur besarnya pengaruh variabel x (pengelolaan masjid) yang merupakan variabel bebas/prediktor terhadap variabel y (pemberdayaan umat) sebagai variabel terikat/kriterium. Dampak dari penggunaan analisis regresi adalah membuat simpulan atau putusan apakah menaik-turunkan variabel bebas dapat menaik-turunkan variabel terikat (Usman, 2009: 215-216; Sugiyono: 1997: 227)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis indeks (persepsi) dan regresi. Analisis pertama yang dilakukan adalah tabulasi sederhana untuk mendapatkan gambaran data yang didapat dari kuesioner yang menggambarkan karakteristik tertentu dari responden. Kemudian untuk mengetahui penggolongan kategori hasil jawaban tiap variabel ditentukan intervalnya. Sugiyono (2005: 29) menyatakan untuk mengukur interval (I) yaitu: skor tertinggi (Nt) dikurangi skor terendah (Nr) dibagi keseluruhan alternatif jawaban/kategori (K). Digambarkan dengan rumus:  $I = [Nt - Nr] / K$ .

Analisis kedua yaitu analisis statistik regresi sederhana dengan program SPSS. Teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat Islam dengan analisis uji kolerasi linier. Rumus regresi linear sederhana adalah  $\hat{y} = a + b x$ .  $\hat{Y}$  adalah variabel

dependen atau variabel tak bebas, sedangkan  $x$  adalah variabel independen atau variabel bebas.  $\hat{Y}$  dianggap variabel tak bebas karena nilainya dipengaruhi oleh variabel  $x$  dan tidak berlaku sebaliknya. Dalam penelitian ini variabel  $y$ =pemberdayaan umat dan  $x$ =pengelolaan masjid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2016 wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan yang terbagi dalam 307 Kelurahan/Desa (BPS Kabupaten Ponorogo, 2017: 38), sedangkan wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan yang terbagi ke dalam 419 Desa dan 11 Kelurahan (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2017: 1). Dari luas wilayah dua kabupaten tersebut yang terbagi dalam kecamatan dan desa/kelurahan didapatkan data jumlah masjid yang mencapai ribuan. Masjid di Kabupaten Ponorogo kurang lebih sejumlah 2.009 masjid, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.235 masjid (Kemenag Kabupaten Ponorogo, 2017: 44; Kemenag Kabupaten Bojonegoro, 2017: 42). Jumlah masjid yang besar ini, dan ditambah jumlah musala yang banyak pula, belum didata pendayagunaannya secara akurat, sehingga terbuka peluang yang luas untuk dikaji.

Pemilihan lokasi penelitian, dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro diacak masing-masing 5 kecamatan. Kemudian di tiap kecamatan diacak kembali untuk dipilih 4 desa/kelurahan berikut masjidnya. Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah masjid di Kabupaten Ponorogo kurang lebih sejumlah 2.009 masjid, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.235 masjid (Kemenag Kabupaten Ponorogo, 2017: 44; Kemenag Kabupaten Bojonegoro, 2017: 42). Adapun sebaran lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut ini.

Tabel 2. Sebaran Lokasi Penelitian di Kabupaten Ponorogo

KABUPATEN PONOROGO		
KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA MASJID
Siman	Siman	Besar Al-Mustawa
	Ronosentanan	Baiturrahman
	Ronowijayan	Ihsan (MD)
	Tajug	Darussalam
Ponorogo	Bangunsari	Al Mu'min
	Kepatihan	I'anutul Muslimin
	Purosuman	Al-Djadjuli
	Tonatan	Suronoto
Jetis	Ngasinan	Abdul Syukur
	Karanggebang	Al Ikhlah
	Tegalsari	Masjid Jami' Tegalsari
	Josari	Baitu Makmur
Jenangan	Mrican	Nurul Ihsan
	Singosaren	An Nuur
	Plalangan	Baitul Akbar
	Jimbe	Al Barokah
Slahung	Galak	Darul Fataah
	Kambeng	Baitul Muttaqin
	Menggare	Al-Jariyah
	Nailan	Al-Ikhlas

Tabel 3. Sebaran Lokasi Penelitian di Kabupaten Bojonegoro

KABUPATEN BOJONEGORO		
KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA MASJID
Tambakrejo	Sukorejo	Jami Arrohman
	Tambakrejo	Darussalam
	Tanjung	At Taqwa
	Dolokgede	Arrohmah
Bojonegoro	Mojokampung	At-Taqwa Mojokampung
	Kadipaten	At-Taqwa Kadipaten
	Sumbang	Baiturrahman
	Pacul	Al Fatah
Padangan	Sonorejo	Bina Patria
	Padangan	Darul Muttaqin
	Kuncen	At Taqwa
	Kalangan	Ad Dakwah
Kedungadem	Jamberejo	Baitul Mukminin
	Megale	At-Taqwa
	Kedungadem	Al Munajah
	Kesongo	Nur Rohman

Sugiharas	Jatitengah	Darul Huda
	Glagahwangi	Babussalam
	Sugiharas	Al Furqon
	Wedoro	Roudotul Jannah

## Deskripsi Responden

Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa dalam penyebaran kuesioner ini peneliti dibantu oleh 5 orang surveyor di tiap Kabupaten yang terdiri dari para penyuluh. Penyuluh kemudian mengacak desa/kelurahan dan menentukan masjidnya. Di tiap masjid, surveyor menentukan perwakilan dari pengurus masjid (yang dianggap mengenal masjid dengan baik) serta perwakilan jamaah asli dari masjid tersebut (bukan jamaah pendatang).

Tabel 4. Deskripsi Responden Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro

Unsur	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Bojonegoro
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	67	75
Perempuan	33	25
<b>Kedudukan dalam masjid</b>		
Pengurus	44	43
Jamaah	56	57
<b>Pendidikan Responden</b>		
SD/Sederajat	12	12
SLTP/Sederajat	6	20
SLTA/Sederajat	36	34
Diploma/S1	35	27
S2	11	6
S3	0	0
Lain-lain	0	1
<b>Pekerjaan Responden</b>		
PNS	20	14
TNI/Polri	30	31
Swasta	3	1
BUMN/BUMD	1	0
Wiraswasta	19	18
Ibu Rumah Tangga	12	13
Lain-lain	15	23

Umur Responden		
Remaja <20	4	0
Dewasa awal 21-40	23	27
Dewasa madya 41-60	56	58
Lanjut >61	17	15

Sumber: diolah dari data primer

## Persepsi Responden terhadap variabel penelitian

Rekap kuesioner responden penelitian terhadap variabel X (pengelolaan masjid) dan variabel Y (pemberdayaan umat) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Statistika	X Ponorogo	Y	X Bojonegoro	Y Bojonegoro
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean	75,72	65,79	73,11	63,26
Std. Dev	11,46	9,98	11,23	10,67
Range	55	43	59	45
Minimum	45	40	42	39
Maximum	100	83	101	84

Sumber: diolah dari data primer

Data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden di tiap kabupaten diketahui bahwa di Pengelolaan masjid di Ponorogo skor minimal 45, maksimal 100, dengan range 55. Pemberdayaan umat di Ponorogo skor minimal 40, maksimal 83, dan range 43. Pengelolaan masjid di Bojonegoro skor minimal 42, maksimal 101, dan range 59. Pemberdayaan umat di Bojonegoro skor minimal 39, maksimal 84, dan range 45. Baik di Ponorogo maupun di Bojonegoro persepsi masyarakat terhadap pengelolaan masjid lebih tinggi dibanding pemberdayaan umat.

## Persepsi Responden terhadap "pengelolaan masjid"

Pengukuran persepsi pengelolaan masjid ditentukan dengan skala likert yang sebelumnya ditentukan intervalnya. Jumlah kategori

jawaban (K) adalah 4, jumlah item pertanyaan variabel pengelolaan masjid adalah 26 yang juga merupakan nilai terendah (Nr), sedangkan nilai tertinggi adalah 104 (Nt). Dengan menggunakan rumus interval  $I = [Nt - Nr] : K$ , didapatkan intervalnya adalah 19,5. Hasil penghitungan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan masjid di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 6. Pengelolaan Masjid di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro

Interval X	Kriteria	Frekuensi X Ponorogo	Frekuensi X Bojonegoro
26 - 45,50	Tidak Baik	1	2
> 45,50 - 65	Cukup Baik	15	16
> 65 - 84,50	Baik	61	68
> 84,50 - 104	Sangat Baik	23	14
Jumlah		100	100

Adapun pengukuran lebih rinci pada tingkat sub variabel pengelolaan masjid dapat dilihat dalam indeks pengelolaan masjid (Tabel 7) dengan skala pengukuran likert 1-4.

Tabel 7. Indeks Pengelolaan Masjid

Sub Variabel	Ponorogo	Bojonegoro
Perencanaan	3,01	2,88
Pengorganisasian	2,96	2,87
Pelaksanaan	2,65	2,55
Pengawasan	3,09	3,01
Total Indeks	2,93	2,83

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada variabel pengelolaan masjid di kedua Kabupaten nilai terendah berada pada sub pelaksanaan. Ada 8 aspek yang ditanyakan dalam sub variabel pelaksanaan (dapat dilihat dalam lampiran instrumen). Item pertanyaan 16 (masjid menyelenggarakan kegiatan ekonomi syariah bagi jamaah) dan 17 (masjid memberdayakan ekonomi jamaah melalui bantuan modal/tenaga ahli) keduanya bernilai rendah di Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro yaitu dengan rata-rata tidak sampai nilai 2 dari skala 1-4. Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan ekonomi (syariah) yang melibatkan jamaah masih kurang diperhatikan oleh masjid di Ponorogo dan

Bojonegoro.

Angka yang cukup rendah dari harapan berikutnya setelah sisi perekonomian adalah item pertanyaan 13 (kegiatan pengajian rutin bagi remaja). Dari skala 1-4, nilai Ponorogo: 2,67 lebih rendah dari Bojonegoro: 2,81. Hal ini barangkali dapat ditelisik karena Ponorogo memiliki jumlah pesantren lebih banyak dari Bojonegoro -sebagaimana yang diceritakan oleh para surveyor-, sehingga masjid bukan satu-satunya tempat pengajian bagi remaja. Informasi yang ditambahkan para surveyor memberikan tambahan penjelasan, bahwa nilai tinggi untuk item ini sebenarnya lebih diartikan pada keberadaan pengajian Alquran (TPQ) untuk anak dan remaja, bukan kajian keilmuan (Diniyah). Jika dua item ini dipisahkan, pada item diniyah atau kajian rutin dimungkinkan akan bernilai lebih rendah lagi.

### Persepsi Responden terhadap “Pemberdayaan Umat”

Pengukuran persepsi pemberdayaan umat juga diukur dengan skala likert yang sebelumnya ditentukan intervalnya. Jumlah kategori jawaban (K) adalah 4, jumlah item pertanyaan variabel pemberdayaan umat adalah 21 yang juga merupakan nilai terendah (Nr), sedangkan nilai tertinggi adalah 84 (Nt). Dengan menggunakan rumus interval  $I = [Nt - Nr] : K$ , didapatkan intervalnya adalah 15,75. Hasil penghitungan persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan umat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Pemberdayaan umat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro

Interval Y	Kriteria	Frekuensi Y Ponorogo	Frekuensi Y Bojonegoro
21 - 36,75	Tidak Baik	0	0
> 36,75 - 52,50	Cukup Baik	10	20
> 52,50 - 68,25	Baik	48	41
> 68,25 - 84	Sangat Baik	42	39
Jumlah		100	100

Pengukuran lebih rinci pada tingkat sub variabel pemberdayaan umat dapat dilihat dalam



indeks pemberdayaan umat (Tabel 9) dengan skala pengukuran likert 1-4.

Tabel 9. Indeks pemberdayaan umat

Sub Variabel	Ponorogo	Bojonegoro
Aksesibilitas Informasi	3,21	3,02
Partisipasi/Keterlibatan	3,14	3,07
Akuntabilitas	3,29	3,29
Organisasi Lokal	2,99	2,83
Total Indeks	3,16	3,05

Tabel 9 menunjukkan bahwa sub variabel terendah dari pembebrdayaan umat adalah aspek organisasi lokal. Ada 7 item pertanyaan pada sub organisasi lokal. Nilai terendah pada item 17, 18, 19. Item 17 (takmir mampu meberdayakan potensi masyarakat) nilai Ponorogo: 2,89 dan Bojonegoro: 2,74. Item 18 (sumber dana masjid dikelola untuk pemberdayaan ekonomi jamaah) nilai Ponorogo: 2,06 dan Bojonegoro: 1,86. Item 19 (sebagian sumbangan jamaah digunakan untuk pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan masjid) nilai Ponorogo: 2,75 dan Bojonegoro: 2,51. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi masjid belum maksimal dalam memberdayakan kepentingan jamaah. Dimungkinkan pula masih banyak masjid yang membatasi peruntukan dana kas masjid sebatas penggunaannya untuk urusan masjid saja (ibadah mahdlah) tidak sampai menyentuh kepentingan sosial (ekonomi jamaah).

### Uji Pengaruh Pengelolaan Masjid Terhadap Pemberdayaan Umat

Korelasi antara pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat pada masjid di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 10 dan 11 berikut ini.

Tabel 10. Hasil Uji Korelasi Variabel Penelitian di Ponorogo

Correlations		
	Pon.X	Pon.Y
Pon.X	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

Pon.Y	Pearson Correlation	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 11. Hasil Uji Korelasi Variabel Penelitian di Bojonegoro

Correlations			
	Boj.X	Boj.Y	
Boj.X	Pearson Correlation	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	
Boj.Y	Pearson Correlation	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 10 dan 11 di atas menunjukkan bahwa korelasi variabel pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat sebesar 0,728 untuk Ponorogo dan 0,734 untuk Bojonegoro, dengan signifikansi keduanya  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dikatakan signifikansi dua variabel di kedua lokasi tersebut cukup kuat.

Hasil uji Anova untuk mengetahui hipotesis penelitian diterima atau ditolak dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 berikut ini.

Tabel 12. Hasil Uji Anova untuk Ponorogo

ANOVA <sup>b</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	6.774.861	1	6.774.861	214.469	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.095.729	98	31.589		
	Total	9.870.590	99			

Predictors: (Constant), Pon.X

Dependent Variable: Pon.Y

Tabel 13. Hasil Uji Anova untuk Bojonegoro

ANOVA <sup>b</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	7.828.684	1	7.828.684	223.380	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.434.556	98	35.046		
	Total	11.263.240	99			

Predictors: (Constant), Boj.X

Dependent Variable: Boj.Y

Tabel 12 dan 13 di atas menunjukkan bahwa hasil uji regresi diperoleh signifikansi kedua lokasi  $0,000 < 0,05$ , atau dengan kata lain signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  (*confident level* 95%). Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh antara pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat diterima.

Hasil uji koefisien persamaan regresi variabel pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat di Ponorogo dan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 14 dan 15.

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Persamaan Regresi untuk Ponorogo

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.153	3.773		2.956	.004
	Pon.X	.722	.049	.828	14.645	.000

a. Dependent Variable: Pon.Y

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Persamaan Regresi untuk Bojonegoro

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.359	3.919		1.368	.002
	Boj.X	.792	.053	.834	14.946	.000

a. Dependent Variable: Boj.Y

Tabel 14 dan 15 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar  $0,722$  untuk Ponorogo dan  $0,792$  untuk Bojonegoro, yang keduanya bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa meningkatnya pengelolaan masjid berpengaruh terhadap pemberdayaan umat.

Adapun besaran pengaruh variabel X terhadap Y dapat dilihat pada tabel 16 dan 17 berikut ini.

Tabel 16. Hasil Uji Pengaruh Variabel X pada Y untuk Ponorogo

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 <sup>a</sup>	.529	.683	562.042

Predictors: (Constant), Pon.X  
Dependent Variable: Pon.Y

Tabel 17. Hasil Uji Pengaruh Variabel X pada Y untuk Bojonegoro

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 <sup>a</sup>	.538	.692	592.001

Predictors: (Constant), Boj.X  
Dependent Variable: Boj.Y

Pengaruh pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat seperti ditunjukkan tabel 16 dan 17 adalah diperoleh nilai *R square* sebesar  $0,529$  untuk Ponorogo dan  $0,538$  untuk Bojonegoro. Hal ini dapat diartikan bahwa 53% dan 54% pemberdayaan umat di Ponorogo dan Bojonegoro dipengaruhi oleh pengelolaan masjid. Angka pengaruh tersebut cukup besar karena sudah lebih dari 50%. Adapun sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## SIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan masjid di kedua Kabupaten secara umum dapat dikatakan sudah baik yang ditunjukkan dengan jumlah 84% dan 82% jawaban responden menjawab dalam kategori baik dan sangat baik. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan umat yang ditunjukkan dengan jumlah 90% dan 80% jawaban responden yang menjawab kategori baik dan sangat baik. Hasil data tersebut memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dua variabel di Ponorogo lebih baik dari Bojonegoro meskipun hanya berselisih 2% dan 10%.

Hasil persepsi masyarakat terhadap dua variabel dikatakan baik, walaupun demikian ada beberapa kelemahan terutama pada aspek pengorganisasian dan pelaksanaan dalam pengelolaan masjid, serta pada aspek organisasi

lokal pada pemberdayaan umat. Secara umum, masjid dinilai masih kurang dalam memperhatikan pemberdayaan ekonomi jamaah serta kajian untuk remaja.

Hasil pengukuran pengaruh (regresi) pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat di kedua Kabupaten menyatakan bahwa korelasi kedua variabel cukup kuat yaitu 0,728 dan 0,734. Hasil uji koefisien regresi juga bernilai positif, yang diartikan bahwa peningkatan pengelolaan masjid berpengaruh terhadap pemberdayaan umat. Besaran pengaruh pengelolaan masjid terhadap pemberdayaan umat sebesar 53% untuk Ponorogo dan 54% untuk Bojonegoro.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada semua pihak, pentingnya memperhatikan pengelolaan masjid dan meningkatkannya kembali terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi jamaah serta pemberdayaan jamaah remaja. Masjid difungsikan kembali lebih luas, tidak hanya sebagai tempat beribadah *mahdlah* tetapi juga menyangkut faktor sosial. Demikian pula aspek jamaah, remaja perlu diperhatikan dan lebih diprioritaskan kembali sebagai unsur warga jamaah masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Rifki. 2017. "Analisis Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Serentak 2015 (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Astari, Puji. 2014. "Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat". *Jurnal Ilmu dakwah dan Pengembangan Komunitas*. Vol. 9(1) Januari 2014. Hlm. 33-44.
- Bahri, Saeful. 2011. *Studi Arkeologi Keagamaan Masjid Kuno Bersejarah*. Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Jakarta.
- BPS Kabupaten Ponorogo. 2017. "Kabupaten Ponorogo Dalam Angka". Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. 2017. "Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka". Dari Website <http://www.bojonegorokab.go.id/bojonegorodalamangka>. diakses pada 13 April 2017.
- Dalmeri. 2014. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural". *Jurnal Walisongo*. Vol. 22(2) November 2014. Hlm. 321-350.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2014. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
- Ichsan, A Syalaby. 2014. "DMI Bentuk Tim Survei Masjid". <http://www.republika.co.id>. diakses pada 13 April 2017.
- Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. 2017. *Data Masjid Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017*.
- Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 2017. *Data Masjid Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2017*.
- Kurniawati, Endah. 2010. "Peran Masjid dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Masjid Nurussalawat Dliko Indah Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2010". *Skripsi*. STAIN Salatiga.
- Kurniawan, Syamsul. 2014. "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam". *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 4(2) September 2014. Hlm. 169-184.
- Maharani, Ania. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. <http://dkijakarta.bkkbn.go.id>. Diakses pada 13 April 2017.
- Mawardi, dkk. 2017. *Laporan Hasil Penelitian Pengelolaan Masjid Terhadap Pemberdayaan Umat di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Rapik, Mohamad. 2014. "Deradikalisasi Fahaman Keagamaan Sudut Pandang Islam". *Jurnal Inovatif*. Vol. VII(2) Mei 2014.
- Ruslan, Ismail. 2012. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak". *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 2(1) Maret 2012. Hlm. 16-26.

- Sugiyono. 1997. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- . 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnaningsih, Ana. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widyakarya..
- Suryani, Husniyah dan Siti Inayatul Faizah. 2015. "Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptif pada PKL di Kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya). *Jurnal JESTT*. Vol. 2(5) Mei 2015. Hlm. 387-399.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.